

IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDART AKUNTANSI DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Author:

Poppy Adetiya¹
Ayu Kurnia Sari²

Afiliation:

Universitas Pembangunan Panca
Budi¹

Corresponding email

poppyadetiya02@gmail.com



*This is an Creative Commons License This work is
licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International License*

Abstrak

Latar belakang : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Desa Klambir V - Desa Klambir V masih menghadapi beberapa kendala yang berakibat pada inefisiensi pengelolaan keuangan dan lemahnya akuntabilitas publik. Berikut beberapa latar belakang masalah yang perlu dikaji. Kurangnya Pemahaman terhadap SAP diantaranya Banyak pegawai di Desa Klambir V - Desa Klambir V yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang SAP. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menerapkan SAP secara konsisten dan benar, Kurangnya pemahaman ini dapat berakibat pada penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Metode penelitian: Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif . Dimana metode deskriptif ini bertujuan untuk menguraikan sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti". Rusiadi (2013:14).

Hasil penelitian: Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di wilayah desa Klambir V, dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap perangkat desa serta dokumen keuangan desa. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa telah mengenal Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Kesimpulan: Implementasi standar akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa telah memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih diperlukan pembinaan dan peningkatan kompetensi aparat desa untuk optimalisasi pelaksanaan di lapangan.

Kata kunci: Standar Akuntansi dan keuangan desa

1. Pendahuluan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Desa Klambir V - Desa Klambir V masih menghadapi beberapa kendala yang berakibat pada inefisiensi pengelolaan keuangan dan lemahnya akuntabilitas publik. Berikut beberapa latar belakang masalah yang perlu dikaji. Kurangnya Pemahaman terhadap SAP diantaranya Banyak pegawai di Desa Klambir V - Desa Klambir V yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang SAP. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menerapkan SAP secara konsisten dan benar, Kurangnya pemahaman ini dapat berakibat pada penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kelemahan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yakni sistem informasi pengelolaan keuangan di Desa Klambir V - Desa Klambir V masih belum memadai untuk mendukung penerapan SAP dan kelemahan sistem ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan monitoring kinerja keuangan. Sarana dan Prasarana yang Terbatas. Desa Klambir V - Desa Klambir V memiliki keterbatasan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan SAP, seperti komputer, software akuntansi, dan jaringan internet dan keterbatasan ini dapat menghambat proses penerapan SAP dan menghambat kelancaran pengelolaan keuangan. Kurangnya dukungan manajemen adalah dukungan manajemen terhadap penerapan Implementasi penerapan standart akuntansi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa - Desa Klambir V masih belum optimal dan kurangnya dukungan ini dapat menyebabkan demotivasi pegawai dalam menerapkan SAP dan menghambat pencapaian tujuan penerapan SAP. Budaya Organisasi yang Belum Mendukung, budaya organisasi di Desa Klambir V - Desa Klambir V masih belum sepenuhnya mendukung penerapan SAP. Budaya yang belum mendukung ini dapat menyebabkan resistensi terhadap perubahan dan menghambat proses adaptasi terhadap SAP.

2. Studi Literatur

Grand Teori Penatagunaan Publik/ *Public Stewardship Theory*

Teori ini menekankan tanggung jawab fidusia pejabat pemerintah untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien untuk kepentingan publik. SAP dirancang untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik.

Prinsip-prinsip utama teori penatalayanan publik:

1. Akuntabilitas: Pejabat pemerintah bertanggung jawab kepada publik atas penggunaan sumber daya publik.
2. Transparansi: Informasi keuangan harus transparan dan dapat diakses oleh publik.
3. Efisiensi: Sumber daya publik harus digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan publik.
4. Efektivitas: Program dan kegiatan publik harus efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan.

SAP diselaraskan dengan teori penatagunaan publik dengan mewajibkan penyusunan laporan keuangan yang memberikan gambaran yang wajar dan akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas pemerintah. Prinsip dan praktik akuntansi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Menetapkan standar pelaporan keuangan yang memungkinkan pengguna menilai kesehatan keuangan dan keberlanjutan entitas pemerintah.

3. Metode Penelitian

Pedekatan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif . Dimana metode deskriptif ini bertujuan untuk menguraikan sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti”. Rusiadi (2013:14).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di wilayah desa Klambir V, dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap perangkat desa serta dokumen keuangan desa. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa telah mengenal Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, implementasi teknis terhadap standar akuntansi desa belum sepenuhnya merata di seluruh aparatur. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Telah Dimulai dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa. Seluruh desa yang diteliti telah menerapkan format laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan aset tetap sesuai ketentuan. Dengan penerapan standar akuntansi, keuangan desa menjadi lebih tertib administrasi. Laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan lebih mudah diaudit oleh Inspektorat maupun BPKP. Banyak bendahara desa belum memiliki latar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi, sehingga pelaporan terkadang hanya formalitas, tanpa memahami substansi standar akuntansi yang diterapkan. Warga desa mengaku lebih percaya terhadap pengelolaan dana desa karena informasi anggaran dan realisasi kini lebih terbuka dan terstandarisasi, termasuk adanya papan informasi publik dan laporan APBDes yang terpampang secara transparan.

4.2 Pembahasan

Penerapan standar akuntansi desa merupakan langkah strategis untuk mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dan penguatan otonomi desa. Penelitian ini mendukung teori Akuntabilitas Publik yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Standar akuntansi menjadi alat penting dalam menyediakan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan antar waktu. Namun, penerapan tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga kapasitas SDM, sistem informasi keuangan yang mendukung, serta pengawasan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan masyarakat.

5. Kesimpulan

Implementasi standar akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa telah memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih diperlukan pembinaan dan peningkatan kompetensi aparat desa untuk optimalisasi pelaksanaan di lapangan.

Referensi

- Fred R. David, 2018. Manajemen Strategi. Indeks Gramedia. Jakarta
- Hadiyanto, D. W. (2022). Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Belanja Barang Selama Pandemi Covid-19 pada Pemerintah - Desa Klambir V Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Hasen, dan Mowen, 2016. Management Accounting. Salemba 4. Jakarta.
- Hasana, N. A., & Hamdani, G. 2023. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Finansial terhadap Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan, 14(7).
- Ismail, Hanif, dan Darsono Prawironegoro, 2019 Sistem Pengendalian Manajemen, konsep dan Aplikasi. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Kaplan, R, S dan Norton, D, P, 2018. Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi. Erlangga. Jakarta.

- Made, A., & Ak, C. A. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Di Kantor Dppkad Kabupaten Situbondo).
- Mulyadi, 2014. Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced Scorecard. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mulyadi, 2017. Balanced Scorecard : Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan. Edisi kedua. Salemba . Jakarta.
- Mahsun, 2018. Metode Penelitian. Duta Wacana University Press. Yogyakarta
- Pardede, Pontas M., 2015. Manajemen Operasi dan Produksi: Teori, Model, dan Kebijakan. Edisi Pertama: Andi. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta.
- Sihombing, A., Ranie, Z. A., & Kaputama, K. A. S. Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Wilayah - Desa Klambir V.
- Sedamaryanti, 2018. Manajemen Strategi. Refika Aditama. Bandung.
- Watubun, J. S., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (studi di kantor DPPKAD kabupaten situbondo). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 4(2).